

Day 10/10/01

SKRIPSI

ERISTA CATUR PUSPITASARI

**UPAYA HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS
YANG DIRUGIKAN
AKIBAT PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI PAILIT**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

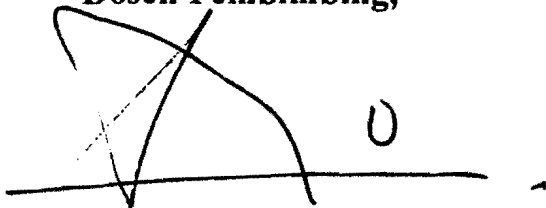
**UPAYA PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG
DIRUGIKAN
AKIBAT PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI PAILIT**

SKRIPSI

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk
Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP : 130 325 843

Penyusun,



Erista Catur Puspitasari
NIM : 039714579

**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada
tanggal 26 Januari 2001.**

Panitia Penguji Skripsi :

KETUA : H. SAMZARI BOENTORO, S.H.

ANGGOTA : H.A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.

SRI WOELAN AZIS, S.H.

Dra. Hj. SOENDARI KABAT, S.H., M.Hum

AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.

BAB V

PENUTUP



1. Kesimpulan

1. UUPT memang tidak menggolongkan macam pemegang saham, namun dari prosentase saham yang dimiliki pemegang saham, maka pemegang saham dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kedua pemegang saham itu, walaupun secara prosentase saham yang dimiliki berbeda namun kedudukannya adalah sebagai pemilik PT, karena mereka ikut serta memasukkan modal atau sahamnya pada PT yang bersangkutan. Bagi pemegang saham mayoritas, sebagai pembuat kebijakan dalam PT tidak akan sulit baginya apabila hendak menuntut hak-haknya, karena ia tidak mungkin akan membuat kebijakan yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Tetapi bagi pemegang saham minoritas dengan prosentase saham yang kecil, akan sulit bagi mereka untuk menuntut hak-haknya, apabila dirugikan atas tindakan PT, direksi atau komisaris, kecuali apabila pemegang saham itu mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang ada. Karena itu UUPT berusaha memberi perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dengan memberinya berbagai macam hak.
2. Suatu PT dinyatakan pailit apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Pada saat PT dijatuhi putusan pailit atau pernyataan pailit diterima, maka wewenang

pengurusan dan/atau pemberesan harta kekayaan PT yang dinyatakan pailit tidak lagi berada pada direksi, melainkan beralih pada kuratornya. Kurator itulah yang melakukan pengurusan dan pemberesan. Dan dalam pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam hal PT belum dinyatakan pailit, pemohon pailit dapat memohon kepada hakim pengadilan niaga untuk membentuk kurator sementara.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat PT mengalami pailit adalah dengan mengajukan gugatan kepada direksi ke pengadilan negeri, karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. Karena kerugian yang dialami PT, pada hakekatnya juga merupakan kerugian bagi pemegang saham minoritas sebagai pemilik PT.

2. Saran

1. Sehubungan dengan kedudukan pemegang saham minoritas yang memasukkan penyertaan modalnya dalam PT maka kedudukan mereka adalah sebagai pemilik PT, maka ia berhak juga menikmati hak-haknya seperti pemegang saham lainnya. Dan selama ini kedudukan pemegang saham minoritas selalu dikalahkan atau dibawah pemegang saham mayoritas, sehingga perlu adanya perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas agar mereka dapat menikmati hak-haknya seperti layaknya pemegang saham lainnya.

2. Pengadilan niaga dalam menentukan dikabulkannya permohonan pailit harus benar-benar didasarkan atas pertimbangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 dan juga harus memenuhi prosedur lain yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini perlu diperhatikan agar jangan sampai terjadi sebuah PT dipailitkan karena alasan yang tidak berdasar.
3. Bahwa karena pailit merupakan suatu masalah sangat berat yang harus dihadapi oleh PT, maka dalam rangka melakukan perbuatan hukum mengalihkan atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan PT sebagai jaminan utang harus betul-betul dengan persetujuan RUPS dan bukan merupakan tindakan pribadi direksi. Sebab bilamana didalamnya terdapat kesalahan atau kelalaian direksi, maka direksi bertanggung jawab renteng atasnya.